

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Masyarakat Matras yang anti dengan keberadaan kapal isap membentuk sebuah gerakan sosial yang diberi nama gerakan *#savematras*. Ada empat tahapan dalam proses terjadinya gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam menolak isu masuknya KIP di perairan Pantai Matras. Tahap pertama yaitu tahap kemunculan. Pada tahap kemunculan ini adanya isu kapal isap produksi milik PT. Sinar Logindo Alam (SLA) dan mitra PT. Timah yang ingin melakukan penambangan di perairan Pantai Matras.

Pada tahap kedua yaitu tahap penggabungan. Dalam penggabungan ini terbentuklah forum nelayan Bangka (FOR NEBAK) dan juga aliansi pemuda dan mahasiswa Kabupaten Bangka yang terdiri dari Pemuda Abdi Bangsa, ISBA cabang Palembang, Forum Pemuda Matras Peduli Lingkungan, Komunitas Regency (Regeenrasi Musisi), Muathai Babel, dan organisasi lainnya.

Tahap ketiga yaitu tahap birokratisasi. Pada tahap birokratisasi telah adanya pembagian kerja yang jelas, dimana adanya pemimpin dan anggota gerakan sosial. Gerakan sosial ini dinamakan dengan gerakan *#savematras* Selanjutnya terakhir ada tahap penurunan. Pada tahapan ini

gerakan *#savematras* mengalami penurunan, karena gerakan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan dimana perairan Pantai Matras sampai sekarang masih bersih dari KIP.

Dalam gerakan *#savematras* terdapat 4 sumberdaya yang digunakan dalam pergerakan menolak KIP di perairan Pantai Matras. Gerakan *#savematras* mendapat dukungan moral dari masyarakat, WALHI dan LKPI. Kedua ada sumberdaya organisasi sosial yaitu gerakan *#savematras*. Selanjutnya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia menjadi sumberdaya yang nyata dengan banyaknya partisipan yang mendukung gerakan *#savematras*. Terakhir sumberdaya material yang menjadi pendukung gerakan ini. Para nelayan dan masyarakat yang peduli akan lingkungan saling menyumbang sebesar 20 ribu untuk membeli peralatan pendukung gerakan.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Matras yang kontra terhadap KIP mendapatkan perlawanan atau resistensi dari masyarakat yang pro maupun dari perusahaan tambang. Bentuk perlawanan tersebut yaitu pertama, masyarakat yang pro melakukan doa bersama di Pantai Matras agar KIP bisa masuk. Kedua, masyarakat pro melakukan kooptasi dengan menarik masyarakat kontra agar beralih menjadi pro dengan diiming-imingi dana kompensasi. Ketiga, perusahaan tambang memberikan sebidang tanah beserta peralatan olahraga untuk masyarakat di Lingkungan Matras. Keempat, pihak pro mengkooptasi pemimpin dan mengintimidasi serta menteror bapak Fitri selaku pemimpin

dalam gerakan penolakan KIP di perairan Pantai Matras. Kelima, perusahaan menurunkan 4 kapal isap produksi di Perairan Pantai Matras.

Berbagai resistensi yang dilakukan oleh masyarakat yang pro KIP tidak membuat masyarakat kontra menjadi mundur. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan nama gerakan *#savematras* mengalami keberhasilan, karena sampai sekarang tidak ada kapal isap yang beroperasi di perairan Pantai Matras. Keberhasilan yang diperoleh masyarakat yang anti dengan KIP tidak membuat gerakan *#savematras* ini menjadi hilang. Gerakan sosial ini masih tetap ada, namun tidak seaktif saat tahun 2015 yang lalu. Gerakan anti KIP yang dilakukan oleh masyarakat Matras diprediksi masih akan berlanjut, jika perusahaan tambang tetap ingin menurunkan kapal isap produksi di perairan Pantai Matras.

## **B. Implikasi Teori**

Dalam menganalisis proses dan sumberdaya yang digunakan dalam menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras, maka pada penelitian ini penulis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya milik McCarthy dan Zald. Teori mobilisasi sumberdaya McCarthy dan Zald cukup dominan didalam menganalisis gerakan sosial. McCarthy dan Zald mendefinisikan Gerakan sosial sebagai upaya terorganisir untuk mengadakan perubahan atau tidak didalam distribusi hal-hal yang bernilai rasional. Gerakan sosial yang dilakukan masyarakat Matras yang anti dengan KIP merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan lingkungan perairan laut. Masyarakat

sadar akan dampak yang akan mereka rasakan jika kapal isap produksi beroperasi di perairan Pantai Matras.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang anti terhadap KIP tidak akan berjalan jika tidak adanya sumberdaya yang mendukung gerakan sosial tersebut. Masyarakat yang ikut terlibat di dalam gerakan *#savematras* baik itu dari nelayan, aliansi pemuda dan mahasiswa Kabupaten Bangka serta ibu-ibu rumah tangga di lingkungan Matras ikut terlibat didalam gerakan ini karena masyarakat sadar KIP akan memberikan dampak buruk terhadap ekosistem di perairan Pantai Matras. Gerakan sosial terbentuk ketika beragam aktor yang berbeda, baik individu, kelompok informal, dan organisasi formal bersama-sama mengelaborasi identitas kolektif mereka sebagai pihak yang berada dalam sisi yang sama.

Kerusakan ekosistem laut akan berdampak pada hasil tangkapan nelayan, dimana mayoritas nelayan Matras adalah nelayan tradisional yang biasa mencari ikan di kawasan perairan Pantai Matras. Selain sebagai kawasan tangkapan nelayan tradisional, kawasan Matras merupakan kawasan destinasi wisata. Masyarakat yang ikut terlibat telah melewati cara berfikir rasional. Partisipan secara hati-hati memutuskan apakah ikut atau tidak ikut terlibat dalam gerakan, serta menerima konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika ikut didalam gerakan.

Proses terjadinya gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Matras tidak luput dari elemen-elemen yang membuat gerakan ini berhasil.

Motivasi masyarakat dan sumberdaya yang ada menjadi pendukung didalam proses terjadinya gerakan ini. Dengan adanya organisasi yang jelas, membuat gerakan ini bisa tau apa tujuan dari gerakan *#savematras* ini dan juga menentukan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk bisa membuat KIP tidak beroperasi di perairan Pantai Matras. Dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia, seperti dukungan dari luar organisasi yaitu WALHI, LKPI, partisipan dari berbagai elemen masyarakat, strategi dan komitmen yang kuat dari masyarakat membuat gerakan ini berhasil. Sampai saat ini tidak ada KIP yang beroperasi di perairan Pantai Matras. Ini membuktikan bahwa pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial.

### C. Saran

Penelitian ini belum sepenuhnya memberikan kesimpulan menyeluruh. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang terlibat, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pemanfaatan sumberdaya alam sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek ekologi dan lingkungan agar tidak merusak lingkungan. Apalagi jika sudah menyangkut masalah pertambangan, pemerintah harus bisa dengan

tegas memutuskan antara mana zona nelayan, zona pariwisata dan zona tambang. Harusnya pemerintah juga harus komit dengan wacana Bangka Belitung sebagai daerah pariwisata setelah pasca timah.

## 2. Perusahaan tambang

Sebelum melakukan kegiatan penambangan, sebaiknya perusahaan bisa melakukan sosialisasi terbuka dengan seluruh masyarakat yang berada di sekitar wilayah penambangan. Jika belum ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, sebaiknya perusahaan jangan terlebih dahulu melakukan penambangan.

## 3. Masyarakat

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Kalau bukan masyarakat yang sadar akan lingkungan, siapa lagi yang akan menjaga kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Dengan kesadaran akan lingkungan dan peduli akan potensi laut dan pariwisata, maka itu akan menolong kelestarian Pantai Matras khususnya dari kerusakan akibat pertambangan.